

Konsultasi ke Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Gubernur Sultra ASR Pastikan Proyek Strategis Sesuai Aturan



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mematangkan rencana pembangunan Markas Komando Grup 5 Kopassus di Kabupaten Konawe Selatan

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

JAKARTA-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mematangkan rencana pembangunan Markas Komando Grup 5 Kopassus di Kabupaten Konawe Selatan sebagai bagian dari penguatan pertahanan nasional di kawasan timur Indonesia. Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan antara Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, bersama Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas status dan pemanfaatan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Kapas Indah Indonesia yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan markas pasukan elite TNI AD tersebut.

Dalam pertemuan itu,

Lanjut ke Hal: 7

SPMB SMK Negeri 1 Baubau 2025/2027 Dilaksanakan Secara Online, Sekolah Pastikan Transparan dan Bebas Jual Beli Kursi

Laporan: Firman

BAUBAU, BP - SMK Negeri 1 Baubau memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 tetap dilakukan secara online melalui aplikasi yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepala SMK Negeri 1 Baubau, La Mundi melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Masroni mengatakan, sistem penerimaan siswa baru di seluruh SMA dan SMK negeri di Sulawesi Tenggara selama ini dilakukan secara terpusat oleh pemerintah provinsi.

"Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, SPMB dilaksanakan secara online. Siswa bisa mendaftar mandiri dari rumah dan seluruh proses dipantau melalui sistem provinsi," ujar Masroni, saat diwawancara awak media, Sabtu (9/5/2026).

Ia menjelaskan, SMK Negeri 1 Baubau memiliki empat program keahlian,



Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kesiswaan,
Masroni

yakni Akuntansi, Manajemen Perkantoran, Pemasaran, dan Desain Komunikasi Visual (DKV).

Untuk penerimaan siswa baru, sekolah biasanya mendapat kuota sekitar 10 hingga 12 rombongan belajar (rombel). Setiap rombel diisi maksimal 36 siswa sesuai ketentuan aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Menurut Masroni, berbeda dengan SMA yang menerapkan sistem zonasi, SMK lebih menyesuaikan dengan daya tampung sekolah dan pilihan jurusan siswa.

"SMK tidak menggunakan sistem zonasi sep-

erti SMA. Selama kuota rombel masih tersedia, siswa tetap bisa diterima," katanya.

Ia juga menegaskan, proses penerimaan siswa baru di sekolah tersebut berlangsung transparan dan tidak ada praktik jual beli kursi.

"Tidak ada jual beli kursi. Semua proses dilakukan secara online, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi," tegasnya.

Masroni mengungkapkan, jumlah pendaftar setiap tahun bahkan melebihi kuota yang tersedia. Jika daya tampung sekolah sekitar 400 siswa, jumlah pendaftar bisa mencapai 500 hingga 600 orang.

Akibat keterbatasan kuota, sebagian calon siswa yang tidak lolos diarahkan untuk memilih sekolah lain sesuai minat dan program keahlian yang tersedia di berbagai SMK di Sulawesi Tenggara.

"Setiap SMK memiliki

Lanjut ke Hal: 7

BPS Buton Selatan Gelar NGIBAR Perdana SE2026 Bersama Bank Sultra Cabang Pembantu Batauga

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan menggelar kegiatan Ngisi Bareng (NGIBAR). Kegiatan tersebut perdana dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Bank Sultra Cabang Pembantu Batauga, Jumat malam (8/5/2026).

Kegiatan NGIBAR dimulai pukul 18.30 WITA ini dilaksanakan dengan menyesuaikan jam operasional pihak perbankan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Buton Selatan.

Selain dihadiri jajaran Bank Sultra Cabang, kegiatan tersebut juga melibatkan perwakilan BNI KCP Batauga. Kehadiran dua lembaga perbankan itu menjadikan NGIBAR perdana di Buton Selatan yang menghadirkan Dua pelaku usaha skala besar secara bersamaan.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan, La Ode Ikh-sanuddin Hamid, SST.,M.



Si mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.

"Melalui kegiatan NGIBAR ini, BPS memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam proses pengisian data usaha agar data yang dikumpulkan lebih akurat, lengkap, dan berkualitas," ujarnya.

Menurutnya, data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan sektor usaha, hingga per-

encanaan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Pimpinan Bank Sultra Cabang Pembantu Batauga, Yasni Hamaruddin Ode, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan NGIBAR sebagai bagian dari dukungan dunia usaha terhadap Sensus Ekonomi 2026.

Ia menilai kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam membangun sinergi antara BPS dan pelaku usaha guna menghadirkan data ekonomi yang berkualitas dan terpercaya.

"Melalui kegiatan NGIBAR, BPS berharap tumbuh kesadaran bersa-

Lanjut ke Hal: 7

OPINI

PABRIK ASPAL DI KARAWANG: Mengkhianati Jantung Nusantara dan Jalur Emas Maritim Indonesia

Sebuah Janji yang Menggantung di Langit Buton

Pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo berdiri di tanah Buton dan menyatakan komitmen keras negara: Buton harus menjadi pusat industri aspal nasional. Ini bukan sekadar janji kampanye. Ini adalah pernyataan kebijakan negara yang disaksikan publik, direkam media, dan terpatrit dalam harapan rakyat Kepulauan Buton.

Kini, keputusan penempatan pabrik aspal oleh Danantara di Karawang, Jawa Barat, telah mengoyak janji itu. Surat terbuka mantan Pj. Bupati Buton, Basiran, kepada Presiden Prabowo Subianto, bukan sekadar ekspresi kekecewaan personal. Surat itu adalah suara kolektif rakyat Buton "terstruktur, berbasis data, dan konstruktif. Surat itu layak dijawab bukan dengan diam, melainkan dengan dialog kebijakan yang bermartabat.

Tiga Luka dalam Satu Keputusan

Keputusan ini menim-



Dr. Moh. Tasdik, M.Si

bulkan tiga luka sekaligus bagi rakyat Buton.

Pertama, luka sejarah. Buton telah terlalu lama menjadi daerah yang hanya dieksploitasi kekayaan alamnya tanpa pernah menikmati nilai tambahnya. Aspal Buton sudah dikenal dunia sejak era kolonial Belanda. Namun hari ini, tahun 2026, rakyat Buton masih harus menyaksikan bahan baku mereka dikirim ke luar, diolah di luar, dan keuntungannya pun dinikmati di luar.

Kedua, luka ekonomi. Lapangan kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), rantai pasok lokal, dan efek berganda industrialisasi "semuanya

akan tumbuh di Karawang, bukan di Buton. Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini adalah pengalihan kemakmuran secara sistematis dari daerah penghasil ke daerah transit.

Ketiga, luka kepercayaan. Ketika janji negara dilanggar, bukan hanya perasaan yang terluka "kepercayaan rakyat terhadap konsistensi pemerintah pusat pun runtuh. Dan kepercayaan yang runtuh jauh lebih sulit dibangun kembali daripada pabrik yang dipindahkan.

Argumen Efisiensi yang Runtuh di Hadapan Peta Nyata Indonesia

Pemerintah mengklaim bahwa Karawang dipilih karena efisiensi logistik "dekat jaringan tol Jawa yang terintegrasi. Argumen ini terdengar rasional, tetapi runtuh begitu dihadapkan pada peta sesungguhnya Nusantara.

Kebutuhan aspal nasional tidak terpusat di Jawa. Separuh besar pasar aspal Indonesia justru

Lanjut ke Hal: 7

PABRIK ASPAL DI KARAWANG:

Mengkhianati Jantung Nusantara dan Jalur Emas Maritim Indonesia

ada di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua “kawasan yang terus berkembang pesat seiring pembangunan infrastruktur. Memindahkan bahan baku dari Buton ke Karawang, lalu mengirim produk jadi kembali ke timur Indonesia, adalah logika distribusi yang berjalan mundur. Negara menanggung biaya logistik ganda yang seharusnya tidak perlu ada.

Bandingkan dengan posisi Buton jika pabrik dibangun di sana: produk aspal dapat langsung disalurkan ke Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, NTB, bahkan Kalimantan dengan biaya logistik yang jauh lebih kompetitif. Buton bukan pinggiran” Buton adalah tengah.

Buton: Jantung Nusantara di Persimpangan Jalur Maritim Internasional

Yang belum cukup disorot dalam perdebatan ini adalah fakta geopolitik maritim yang sangat fundamental: Kepulauan Buton berada tepat di koridor salah satu jalur pelayaran internasional terbaik di dunia.

Secara geografis, Buton terletak di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III” dua dari tiga alur laut yang ditetapkan sebagai jalur lintas laut internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002. ALKI II membentang dari Selat Lombok ke Laut Banda menuju Samudera Pasifik” jalur utama kapal-kapal kargo raksasa dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan yang menuju Pasifik. ALKI III dengan cabangnya melintasi Laut Maluku dan Laut Banda. Buton duduk di persimpangan strategis antara kedua jalur bersejarah ini.

Laut Banda” yang berbatasan langsung dengan wilayah Kepulauan Buton” adalah salah satu lautan terdalam di dunia dan merupakan bagian dari rute kargo internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kapal-kapal dari Australia, Jepang, Korea, China, Amerika Serikat, bahkan Eropa melintasi kawasan ini setiap hari.

Ini berarti: jika sebuah pabrik aspal dibangun di Buton, produknya tidak hanya mudah didistribusikan ke seluruh penjuru Indonesia “produk itu juga dapat diangkut langsung oleh kapal-kapal kargo internasional yang sudah melintas di perairan

sekitarnya, tanpa harus transit ke Jawa terlebih dahulu. Buton bukan hanya jantung geografis Indonesia “Buton adalah pintu gerbang bagi Indonesia untuk hadir di panggung ekonomi maritim global.

Posisi ini menjadikan Buton sebagai kandidat ideal untuk kawasan industri berbasis ekspor. Tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki kombinasi: sumber daya alam melimpah (deposit aspal terbesar di dunia), posisi di jalur laut internasional, serta akses langsung ke pasar Asia-Pasifik dan Samudera Hindia. Mengabaikan keunggulan komparatif ini demi alasan “kedekatan dengan tol Jawa” bukan hanya tidak efisien “itu adalah malpraktik kebijakan industri.

Buton adalah gerbang barat sekaligus gerbang timur Indonesia. Dari Buton, produk dapat menjangkau Jawa dan Sumatera melalui jalur barat, sekaligus menjangkau Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua, hingga pasar internasional melalui jalur timur. Tidak ada daerah lain di Indonesia yang memiliki keistimewaan posisi seperti ini. Justru inilah yang membuat keputusan menempatkan pabrik di Karawang semakin sulit dipahami dari sudut pandang strategi industri nasional jangka panjang.

Infrastruktur: Alasan yang Diciptakan, Bukan yang Ditemukan

Ada suara yang mengatakan Buton belum siap secara infrastruktur untuk menampung pabrik berskala nasional. Ini adalah argumen yang harus dibalik: siapa yang bertanggung jawab atas ketidaksiapan itu?

Rakyat Buton tidak boleh terus-menerus dihukum atas ketertinggalan infrastruktur yang justru merupakan hasil dari absennya perhatian negara selama puluhan tahun. Membenarkan ketidakadilan dengan merujuk pada ketidaksiapan yang diciptakan oleh negara sendiri adalah argumen yang secara logika dan moral tidak dapat dipertahankan.

Kenyataannya, infrastruktur dasar sudah ada: pabrik milik PT WIKA yang kini mangkrak menunggu kepastian kebijakan; PT Kartika Prima Abadi (KPA) yang sudah terbukti mampu memproduksi dan bahkan memasok aspal ke Ibu Kota Negara (IKN); serta RDTR Kawasan Industri Pertambangan Lasalimu yang sudah ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Buton. Landasan regulasi, fisik, dan teknisnya ada. Yang kurang bukan kapasitas Buton “yang kurang adalah kemauan politik Jakarta.

Hilirisasi Sejati atau Eksploitasi Berbalut Retorika?

Kata ‘hilirisasi’ telah menjadi mantra dalam diskursus ekonomi nasional. Namun hilirisasi yang memindahkan pengolahan dari daerah penghasil ke daerah lain “tanpa membawa kemakmuran bagi masyarakat di tanah asal sumber daya itu “bukanlah hilirisasi. Itu adalah eksploitasi dengan wajah baru.

Hilirisasi sejati terjadi ketika masyarakat di tanah asal bahan baku itu ikut terangkat harkat ekonominya: lapangan kerja terbuka, PAD daerah meningkat, rantai pasok lokal tumbuh, dan generasi berikutnya mewarisi industri “bukan sekadar lubang tambang yang menganga.

Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen pada agenda hilirisasi sebagai pilar ekonomi nasional. Ini adalah kebijakan yang tepat dan harus didukung. Namun konsistensi implementasinya akan diuji, salah satunya, oleh keputusan pabrik aspal ini. Apakah hilirisasi Prabowo benar-benar berpihak pada daerah penghasil, atau hanya memindahkan pusat eksploitasi dari asing ke dalam negeri, dari Jawa ke Jawa?

Langkah Strategis yang Harus Segera Diambil

Perjuangan ini tidak boleh berhenti pada surat terbuka atau keluhan di media sosial. Diperlukan gerakan terstruktur, berkoordinasi, dan menggunakan jalur yang tepat.

Konsolidasi suara menjadi fondasi pertama. Seluruh kepala daerah se-Kepulauan Buton, DPRD, tokoh adat Kesultanan Buton, akademisi, tokoh agama, dan diaspora Buton di seluruh Indonesia harus menyatukan posisi dalam satu pernyataan sikap bersama. Kekuatan kolektif adalah modal utama advokasi.

Jalur konstitusional harus dimaksimalkan melalui advokasi ke DPR RI dan DPD RI. Anggota legislatif dari dapil Sulawesi Tenggara wajib mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian ESDM, BKPM, dan Danantara untuk mempertanyakan secara formal dasar pengambilan keputusan penempatan pabrik

di Karawang.

Narasi publik harus dibangun secara sistematis dan menjangkau media nasional. Isu ini bukan sekadar isu keadilan ekonomi, konsistensi kebijakan, dan strategi maritim nasional. Bingkai isu secara tepat agar mendapat perhatian publik yang lebih luas.

Kajian teknis tandingan harus disiapkan oleh Pemda bersama akademisi Universitas Halu Oleo dan asosiasi industri lokal. Studi kelayakan berbasis data ekonometrik yang membuktikan bahwa membangun pabrik di Buton lebih efisien dan menguntungkan secara nasional dibanding di Karawang adalah senjata paling kuat dalam advokasi berbasis bukti. Data harus melawan data.

Jalur hukum dan kebijakan pun harus diaktifkan. Perda RDTR Kawasan Industri Pertambangan Lasalimu adalah aset legal yang sangat kuat. Jika keputusan Danantara dinilai bertentangan dengan regulasi tata ruang yang sudah ditetapkan, Pemda Buton memiliki dasar hukum yang legitim untuk mengajukan keberatan formal.

Penutup: Jangan Biarkan Buton Hanya Mewarisi Lubang

Kekayaan aspal Buton adalah titipan generasi yang akan datang. Ia tersimpan di tanah yang berada di jantung Nusantara, di persimpangan jalur maritim internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik, di gerbang antara Indonesia barat dan Indonesia timur. Keistimewaan posisi ini adalah anugerah yang tidak dimiliki daerah mana pun di Indonesia.

Mengabaikan semua keunggulan komparatif itu demi argumen ‘efisiensi logistik’ yang tidak tahan uji adalah kesalahan kebijakan yang akan dikenang sejarah.

Untuk masyarakat Buton: bersatulah, jangan biarkan perbedaan politik lokal memecah perjuangan yang jauh lebih besar ini. Untuk Jakarta: hilirisasi yang bermartabat bukan yang memindahkan pusat eksploitasi “melainkan yang mengangkat derajat rakyat di tanah asal sumber daya itu.

Buton memiliki segalanya: sumber daya, posisi strategis, regulasi, dan kapasitas teknis. Yang dibutuhkan hanya satu: keberanian negara untuk berlaku adil.(*)

Konsultasi ke Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Gubernur Sultra ASR Pastikan Proyek Strategis Sesuai Aturan

rombongan Pemerintah Provinsi Sultra turut didampingi Wakil Panglima Kopassus, Ferdial Lubis. Kehadiran unsur TNI dalam pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan markas baru itu menjadi bagian dari agenda strategis nasional di bidang pertahanan dan keamanan.

Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh tahapan pemanfaatan lahan dilakukan sesuai koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Salah satu agenda pembahasan terkait dengan rencana pembangunan Markas Komando Grup 5 Kopassus yang akan dibangun di lahan bekas HGU PT Kapas Indah Indonesia,” ujar Andi Sumangerukka dalam keterangannya.

Menurut ASR, langkah konsultasi ke Kementerian ATR/BPN dilakukan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga proyek strategis tersebut dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan administrasi maupun sengketa hukum di kemudian hari.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin mengambil keputusan secara sepihak, terutama menyangkut pemanfaatan aset negara yang memiliki implikasi sosial dan hukum bagi masyarakat sekitar.

“Pak Menteri memberikan beberapa masukan terkait pemanfaatan lahan tersebut agar semuanya sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada prinsipnya beliau siap mendukung,” kata ASR.

Lahan yang dibahas dalam pertemuan itu diketahui merupakan eks HGU milik PT Kapas Indah Indo-

nesia, anak perusahaan PT Berkari, salah satu badan usaha milik negara (BUMN). Masa berlaku HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 31 Desember 2019.

Total luas lahan eks HGU itu mencapai sekitar 2.393 hektare. Kawasan tersebut dinilai memiliki posisi strategis untuk pengembangan kawasan pertahanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Konawe Selatan.

Secara historis, pembangunan markas militer di kawasan timur Indonesia bukanlah hal baru. Pemerintah pusat sejak era reformasi terus memperkuat distribusi kekuatan pertahanan di luar Pulau Jawa sebagai bagian dari strategi pemerataan keamanan nasional.

Dalam sejarah pertahanan Indonesia, Kopassus memiliki peran penting dalam berbagai operasi militer dan kemanusiaan. Satuan elite TNI AD itu resmi dibentuk pada 16 April 1952 dan berkembang menjadi salah satu pasukan khusus yang disegani di kawasan Asia Tenggara.

Di tingkat internasional, penguatan basis pertahanan di kawasan timur juga sejalan dengan dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang dalam satu dekade terakhir menjadi perhatian banyak negara. Kawasan Asia Tenggara dipandang strategis karena berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan pentingnya modernisasi pertahanan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur militer dan penguatan postur keamanan di daerah-daerah strategis Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menilai keberadaan Markas Grup 5 Kopassus nantinya tidak hanya berdampak pada sektor keamanan, tetapi juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah melalui

pembangunan infrastruktur penunjang, peningkatan investasi, dan pembukaan lapangan kerja baru.

Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo menyebut pemerintah kabupaten siap mendukung langkah-langkah yang dibutuhkan agar rencana pembangunan tersebut berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

“Kami tentu mendukung penuh langkah pemerintah pusat dan provinsi selama seluruh prosesnya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan aturan yang berlaku,” ujar Irham.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kesempatan itu turut mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam proses pengalihan dan pemanfaatan lahan eks HGU agar tidak bertentangan dengan ketentuan agraria nasional.

Menurut ASR, Menteri ATR/BPN juga meminta agar seluruh tahapan administrasi dilakukan secara terbuka dan mengedepankan prinsip kepastian hukum.

ASR menambahkan, pemerintah daerah saat ini terus menjalin komunikasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

“Kami ingin memastikan seluruh langkah yang ditempuh tetap mengedepankan keadilan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak masyarakat,” tegas ASR.

Rencana pembangunan Markas Grup 5 Kopassus di Sulawesi Tenggara diproyeksikan menjadi salah satu proyek strategis nasional di kawasan timur Indonesia yang diharapkan mampu memperkuat sistem pertahanan sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.(*)

SPMB SMK Negeri 1 Baubau 2025/2027 Dilaksanakan Secara Online, Sekolah Pastikan Transparan dan Bebas Jual Beli Kursi

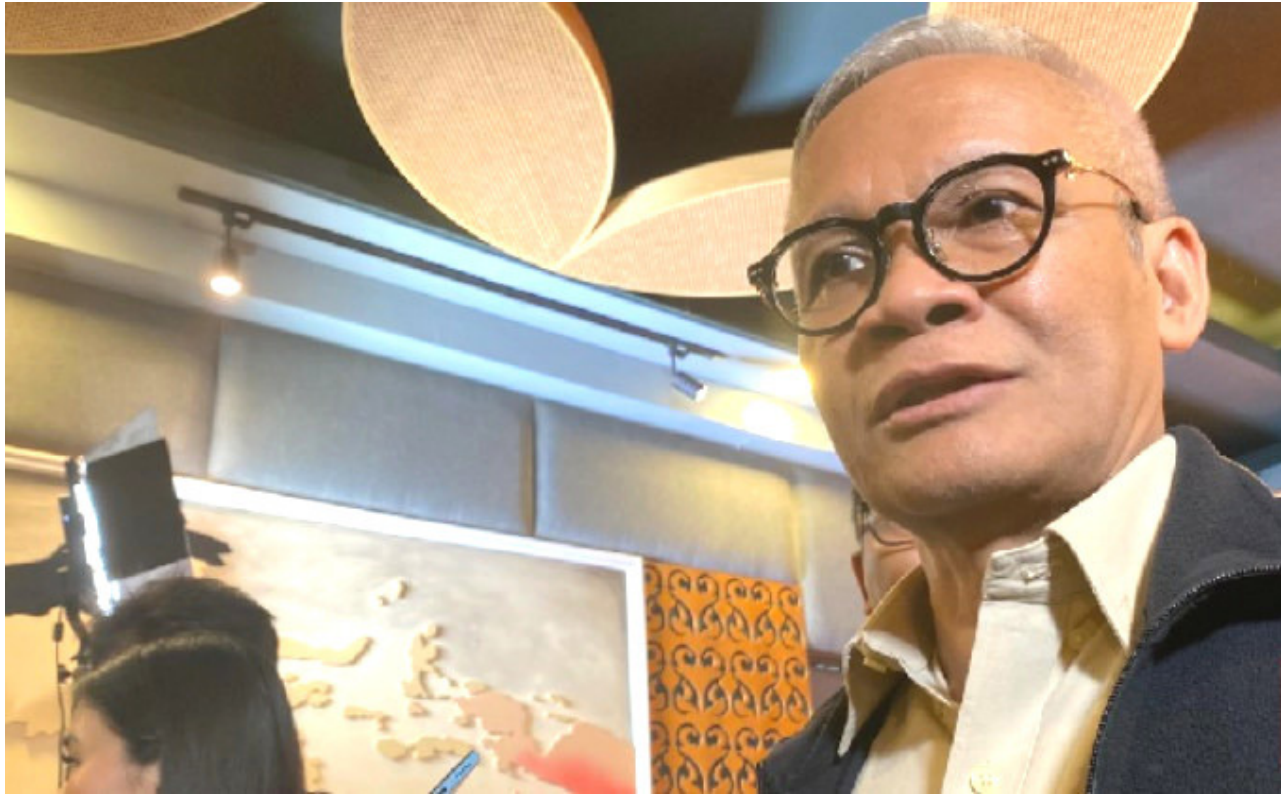
jurusan yang berbeda-beda, ada bisnis daring, perhotelan, teknik kendaraan ringan hingga permesinan. Jadi siswa tetap punya alternatif pilihan sekolah sesuai minat mereka,” pungkasnya.(*)

BPS Buton Selatan Gelar NGIBAR Perdana SE2026 Bersama Bank Sultra Cabang Pembantu Batauga

ma mengenai pentingnya data akurat dalam memotret potensi ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, serta mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Kehadiran pelaku usaha besar dalam kegiatan itu juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya di Kabupaten Buton Selatan untuk turut berpartisipasi aktif menyaksikan Sensus Ekonomi 2026.(*)

Komisi II Tegaskan Pembahasan RUU Pemilu Tetap Dipimpin DPR



Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP-Dewan Perwakilan Rakyat memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tetap diproses sebagai usul inisiatif parlemen meskipun pembahasannya diperkirakan berlangsung kompleks dan sarat kepentingan politik antarfraksi. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima di kompleks parlemen, Selasa (12/5).

Menurut Aria Bima, keputusan menjadikan RUU Pemilu sebagai usul inisiatif DPR telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah DPR. Selain RUU Pemilu, rancangan terkait Pilpres dan Pilkada juga tetap tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas sebagai inisiatif legislatif.

"Sampai hari ini di dalam prolegnas bahwa RUU Pemilu, Pilpres, maupun Pilkada tetap menjadi bagian prolegnas inisiatif DPR," ujar Aria Bima.

Keputusan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kesiapan regulasi pemilu menjelang tahapan Pemilu 2029 yang diperkirakan mulai berjalan pada pertengahan 2026. Hingga kini, DPR belum memulai pembahasan resmi meski revisi aturan dinilai mendasak untuk menyesuaikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi.

Aria Bima mengakui proses pembahasan tidak akan mudah karena DPR harus menerjemahkan berbagai

putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam norma undang-undang. Selain itu, dinamika kepentingan politik antarpantai diperkirakan menjadi tantangan utama dalam penyusunan regulasi baru tersebut.

Salah satu isu paling krusial dalam pembahasan RUU Pemilu ialah penentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Menurut Aria Bima, seluruh fraksi di DPR harus memiliki kesamaan sikap agar pembahasan tidak menimbulkan perpecahan politik.

"Mau nol, mau empat, mau lima, mau tujuh, DPR enggak boleh berselisih," katanya.

Saat ini terdapat dua opsi yang berkembang dalam pembahasan internal parlemen. Opsi pertama ialah mempertahankan ambang batas parlemen sebesar empat persen seperti yang diterapkan pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

Pertimbangan mempertahankan angka tersebut berkaitan dengan efektivitas kerja parlemen. Dengan jumlah 13 komisi di DPR, setiap fraksi membutuhkan minimal dua anggota pada tiap komisi agar fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran berjalan optimal.

Selain mempertahankan ambang batas empat persen, DPR juga membahas kemungkinan penggabungan fraksi bagi partai-partai kecil. Skema itu dinilai dapat menjadi solusi untuk menjaga representasi politik tanpa harus menaikkan parliamen-

tary threshold terlalu tinggi.

"Ada formulasi bahwa tidak ada batas parliamentary threshold, tetapi ada batas minimal jumlah fraksi melalui mekanisme gabungan," ujar Aria Bima.

Wacana agar RUU Pemilu tetap menjadi inisiatif DPR sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saleh Dauly. Ia menilai mekanisme tersebut dapat meredakan tarik-menarik kepentingan partai sejak awal pembahasan.

"Kalau didasarkan atas inisiatif pemerintah, pergelutan pikiran dan agenda parpol dapat dihindari di awal pembahasan," kata Saleh Dauly seperti dikutip dari Detik.com.

Dalam sejarah politik nasional, ambang batas parlemen pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009 sebesar 2,5 persen. Angka itu kemudian naik menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014 dan kembali meningkat menjadi empat persen pada Pemilu 2019 serta 2024. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen agar pemerintahan lebih stabil.

Secara internasional, penerapan parliamentary threshold juga digunakan di berbagai negara demokrasi. Jerman, misalnya, menerapkan ambang batas lima persen untuk menjaga efektivitas parlemen federal. Turki bahkan pernah menerapkan threshold hingga 10 pers-

en sebelum akhirnya diturunkan menjadi tujuh persen. Sementara Belanda tidak menerapkan ambang batas tinggi sehingga sistem kepartaiannya sangat plural.

Pengamat politik menilai perdebatan mengenai ambang batas parlemen selalu berkaitan dengan dua kepentingan utama, yakni efektivitas pemerintahan dan keterwakilan politik. Di satu sisi, threshold tinggi dianggap dapat menciptakan stabilitas politik. Namun di sisi lain, aturan tersebut dinilai berpotensi mengurangi representasi suara pemilih dari partai kecil.

RUU Pemilu kini menjadi salah satu agenda legislasi yang paling dinanti publik karena akan menentukan desain demokrasi Indonesia pada Pemilu mendatang. Selain mengatur ambang batas parlemen, revisi undang-undang juga diperkirakan mencakup sistem pemilu, tata kelola kampanye, hingga mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Meski belum ada kepastian kapan pembahasan dimulai, DPR memastikan seluruh proses akan melibatkan partai politik, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai unsur masyarakat lainnya agar regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat dan mampu menjawab tantangan demokrasi modern di Indonesia. (*)

Puan Maharani Ungkap Agenda Legislasi DPR, RUU Pemilu Belum Prioritas



Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan empat RUU prioritas untuk masa sidang V

Laporan: Radit

JAKARTA, BP-Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum menjadi prioritas utama DPR RI dalam masa sidang V tahun sidang 2025-2026. DPR bersama pemerintah saat ini memilih memfokuskan pembahasan terhadap empat RUU strategis yang dinilai berkaitan langsung dengan penguatan sektor ekonomi, perlindungan hukum, statistik nasional, dan industri kreatif.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang V DPR RI usai reses di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5). Masa sidang kali ini dijadwalkan berlangsung hingga 21 Juli mendatang dengan sejumlah agenda legislasi yang dinilai mendasak.

"DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat satu terhadap beberapa rancangan undang-undang," kata Puan dalam pidatonya di hadapan anggota dewan dan jajaran pemerintah.

Empat RUU yang menjadi prioritas DPR meliputi RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, RUU tentang Hukum Perdata Internasional, RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta RUU tentang Desain Industri.

Keputusan DPR untuk belum memasukkan RUU Pemilu ke dalam daftar prioritas memunculkan perhatian publik dan pengamat politik. Sejumlah kalangan sebelumnya mendorong revisi regulasi pemilu segera dibahas mengingat tahapan Pemilu

2029 diperkirakan mulai berjalan pada pertengahan 2026.

Menurut Puan, pembahasan RUU Pemilu hingga kini masih terus dikomunikasikan antarfraksi. Ia menyebut proses pembicaraan dilakukan melalui forum resmi maupun diskusi informal agar menghasilkan aturan yang matang dan tidak tergesa-gesa.

"Ini kan memang waktunya kalau dikatakan sudah mendekati waktunya, betul. Namun bagaimana yang terbaik untuk rakyat adalah yang paling kami utamakan," ujar Puan kepada wartawan usai rapat paripurna.

Ia menegaskan seluruh fraksi di DPR memiliki pandangan yang sama bahwa revisi aturan pemilu harus dilakukan secara hati-hati. DPR, kata dia, ingin memastikan sistem pemilu mendatang mampu menghasilkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan berkualitas.

"RUU Pemilu memang harus dibahas dengan hati-hati karena menyangkut masa depan demokrasi kita," kata Puan.

Dalam sejarah politik nasional, revisi undang-undang pemilu hampir selalu menjadi perhatian menjelang tahapan pesta demokrasi nasional. Pada Pemilu 2019, pemerintah dan DPR sebelumnya menyepakati berbagai perubahan penting melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menggabungkan aturan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam satu regulasi terpadu.

Sementara itu, pada Pemilu 2024 lalu, sejumlah isu seperti ambang batas parlemen, sistem proporsional terbuka, hingga penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu kembali menjadi perdebatan panjang di ruang publik dan Mahkamah Konstitusi.

Di tingkat inter-

nasional, sejumlah negara demokrasi juga rutin melakukan revisi sistem pemilu menjelang pemilihan umum nasional. Jepang, Korea Selatan, dan Jerman misalnya, beberapa kali melakukan penyesuaian regulasi pemilu guna meningkatkan representasi politik, memperkuat transparansi pendanaan kampanye, hingga memperluas partisipasi pemilih muda.

Pengamat menilai keputusan DPR memprioritaskan sektor ekonomi dan hukum internasional dalam masa sidang kali ini berkaitan dengan tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia, termasuk perlambatan ekonomi dunia, transformasi digital, dan kebutuhan harmonisasi hukum lintas negara.

RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dipandang penting karena menjadi instrumen strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Sementara revisi Undang-Undang Statistik dinilai relevan untuk memperkuat kualitas data nasional pada era kecerdasan buatan dan ekonomi digital.

Adapun RUU Desain Industri diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum lebih kuat terhadap inovasi produk nasional, terutama bagi pelaku usaha kreatif dan industri manufaktur yang semakin berkembang di pasar internasional.

Masa sidang V DPR RI kali ini diperkirakan akan berlangsung dinamis karena selain agenda legislasi, parlemen juga akan menghadapi pembahasan sejumlah isu strategis nasional lain menjelang tahun politik dan persiapan penyelenggaraan agenda demokrasi berikutnya. (*)

KPK Turun ke Kendari Awasi Proyek Pokir DPRD Sultra Bernilai Ratusan Juta



Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD di Sulawesi Tenggara.

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD di Sulawesi Tenggara. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV, lembaga antirasuah itu melakukan uji petik langsung terhadap sejumlah proyek infrastruktur di Kota Kendari, Jumat (8/5/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan lapangan itu juga menjadi bagian dari upaya pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek daerah.

Kepala Satuan Tugas Pencegahan Wilayah Sulawesi Tenggara, Basuki Haryono, memimpin langsung kegiatan tersebut bersama tim gabungan dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka memeriksa kondisi fisik proyek, kualitas pekerjaan, hingga kesesuaian spesifikasi teknis di lapangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Sultra Muhammad Haerun mengatakan pengawasan itu penting karena proyek yang diperiksa berasal dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui anggota

DPRD.

“Pembangunan yang bersumber dari pokir DPRD harus benar-benar menyentuh kebutuhan publik dan tidak boleh sekadar menjadi proyek formalitas,” ujar Haerun di Kendari, Senin (11/5/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut, tim KPK RI dan Inspektorat Sultra meninjau tiga paket pekerjaan utama di Kota Kendari. Salah satunya adalah pembangunan paving blok di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, dengan nilai anggaran sekitar Rp300 juta.

Selain itu, tim juga memeriksa proyek lanjutan pengaspalan jalan di Kelurahan Mokoau yang menelan anggaran sebesar Rp435 juta. Proyek tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan akses mobilitas warga di kawasan permukiman.

Lokasi lainnya yang menjadi sasaran uji petik yakni proyek pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kelurahan Mandonga dengan pagu anggaran mencapai Rp247 juta. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas instalasi dan efektivitas pemanfaatannya bagi masyarakat.

Haerun menjelaskan, pengawasan lapangan tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga menyangkut mutu pekerjaan fisik. Tim gabungan memverifikasi volume pekerjaan, ketepatan penggunaan material, hingga kualitas hasil pembangunan sesuai dokumen kontrak.

“KPK ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar diwujudkan dalam bentuk infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Haerun.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap proyek pokir DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih. Menurut dia, langkah preventif seperti uji petik lapangan dinilai lebih efektif untuk mencegah potensi kerugian negara dibandungkan penindakan setelah pelanggaran terjadi.

Secara nasional, pengawasan terhadap dana aspirasi dan pokir DPRD memang menjadi perhatian KPK dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan catatan lembaga antirasuah, sejumlah kasus korupsi proyek daerah di Indonesia kerap berawal dari praktik pengondisian anggaran pokir, mark up pekerjaan, hingga proyek titipan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

KPK sebelumnya juga pernah melakukan supervisi serupa di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat untuk memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah daerah terhadap penggunaan APBD.

Di tingkat internasional, penguatan pengawasan proyek infrastruktur daerah juga menjadi perhatian lembaga antikorupsi dunia. Transparency

International dalam laporan Global Corruption Report menyebut sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai salah satu area paling rentan terhadap praktik korupsi, terutama pada proyek infrastruktur publik bernilai besar.

Bank Dunia dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) juga mendorong negara-negara berkembang memperkuat mekanisme audit lapangan dan keterbukaan anggaran sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan.

“Kami berharap seluruh proyek yang bersumber dari dana publik dapat dikerjakan secara profesional, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Haerun.

Sebagai tindak lanjut dari hasil uji petik tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan audit mendalam terhadap seluruh proyek yang telah diperiksa. Audit meliputi pemeriksaan administrasi, dokumen kontrak, hingga pengecekan fisik pekerjaan secara menyeluruh.

Hasil audit nantinya akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah sekaligus rekomendasi bagi KPK RI dalam menentukan langkah supervisi lanjutan di Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal agar pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. (*)

Wagub Sultra Hugua Minta OPD Perkuat Program Kerja Berbasis Tri Cita



Laporan: Lisna

SULTRA, BP-Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua menegaskan pentingnya disiplin dan penguatan tata kelola pemerintahan saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Senin (11/5/2026). Penegasan itu disampaikan sebagai bagian dari evaluasi memasuki tahun kedua pemerintahan pasangan ASR-Hugua.

Dalam apel tersebut, Hugua meminta seluruh ASN menjaga profesionalisme serta memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai aturan dan norma birokrasi. Menurut dia, ASN merupakan elemen utama dalam memastikan program pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“ASN harus menjadi teladan dalam disiplin dan pelayanan publik. Pemerintahan yang kuat lahir dari aparaturnya yang bekerja dengan integritas dan tanggung jawab,” kata Hugua di hadapan peserta apel.

Ia menjelaskan, tantangan pembangunan daerah saat ini tidak hanya berkaitan dengan percepatan ekonomi, tetapi juga bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Hugua, visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius tidak akan tercapai tanpa sinergi antar lembaga pemerintahan. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menerjemahkan Tri Cita pembangunan Sultra ke dalam program kerja yang konkret.

“Semua OPD harus mampu menyusun pro-

gram yang terukur dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Tri Cita tidak boleh berhenti sebagai slogan pembangunan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Wagub Sultra juga menyoroti pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai Musrenbang menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi pembangunan lintas wilayah.

Hugua mengatakan, melalui forum perencanaan tersebut, arah pembangunan daerah dapat diterjemahkan secara nyata ke dalam kebijakan anggaran dan program prioritas dalam APBD.

“Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi ruang memperkuat jejaring pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga OPD,” katanya.

Selain membahas tata kelola pemerintahan, Hugua turut menyingsingkan momentum Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipeeringati tahun ini. Ia mengajak seluruh ASN menjaga semangat harmoni Sultra sebagai fondasi pembangunan daerah.

Menurut dia, harmoni memiliki makna strategis dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sosial. Kondisi daerah yang harmonis dinilai mampu menciptakan stabilitas sosial sekaligus mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara historis, konsep harmoni sosial dalam pembangunan daerah telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak era Orde Baru melalui pendekatan pembangunan nasional berorientasi stabilitas. Dalam perkembangan global, konsep serupa juga diterapkan sejumlah negara Asia seperti

Jepang dan Korea Selatan yang menempatkan disiplin birokrasi serta kolaborasi sosial sebagai fondasi kemajuan ekonomi pascaperang.

Di Indonesia, penguatan reformasi birokrasi mulai dipercepat sejak 2010 melalui Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang menitikberatkan pada pelayanan publik, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan daerah. Pemerintah daerah, termasuk di Sulawesi Tenggara, menjadi bagian penting dalam pelaksanaan agenda reformasi tersebut.

Sementara itu, dalam konteks kebencanaan, Hugua memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial dan BPBD Sultra atas respons cepat terhadap banjir yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu terakhir. Ia menilai kecepatan penanganan bencana merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Respons cepat terhadap bencana harus terus dipertahankan. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat dalam kondisi apa pun,” ujar Hugua.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam beberapa tahun terakhir juga terus mendorong penguatan sistem mitigasi bencana di daerah, terutama di wilayah rawan banjir dan cuaca ekstrem. Secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui program Sendai Framework for Disaster Risk Reduction turut menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana.

Apel gabungan ASN tersebut diikuti jajaran pejabat dan pegawai lingkup Pemprov Sultra. Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum konsolidasi pemerintahan untuk memperkuat koordinasi pembangunan daerah, termasuk melalui program global, konsep serupa juga diterapkan sejumlah negara Asia seperti

Bupati Azhari Dipuji Kemenkes karena Tak Pangkas Insentif Dokter



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah pusat memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam memperkuat pelayanan kesehatan daerah melalui peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan percepatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah. Apresiasi itu disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan RI, Azhar Jaya, saat melakukan peninjauan kesiapan rumah sakit tersebut bersama Bupati Buton Tengah, Azhari, Jumat (8/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, dr. Azhar Jaya menilai kebijakan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang tidak memotong insentif dokter spesialis merupakan langkah progresif yang patut dicontoh oleh daerah lain di Indonesia, khususnya wilayah kepulauan dan terpencil yang selama ini mengalami keterbatasan tenaga kesehatan.

"Pusat memberikan insentif Rp30 juta, kemudian ditambah lagi Rp30 juta oleh pemerintah daerah sehingga total mencapai Rp60 juta per bulan. Ini kebijakan yang sangat baik karena membuat dokter spesialis tertarik bertugas di daerah," kata dr. Azhar Jaya di sela peninjauan RSUD Buton Tengah.

RSUD Buton Tengah sendiri merupakan salah satu rumah sakit penerima Program Rumah Sakit Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Terpadu (PHTC), program nasional yang digagas pemerintah pusat pada era Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas layanan kesehatan di daerah.

Program tersebut

diarahkan untuk mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan, terutama di kawasan kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal yang selama bertahun-tahun menghadapi kesenjangan akses pelayanan medis. Secara historis, persoalan distribusi dokter di Indonesia masih menjadi tantangan besar sejak dekade 1990-an, ketika sebagian besar tenaga dokter spesialis terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan rasio dokter spesialis Indonesia hingga 2025 masih berada di bawah sejumlah negara Asia Tenggara. Indonesia memiliki rasio sekitar 0,47 dokter spesialis per 1.000 penduduk, jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang telah melampaui angka 1 dokter per 1.000 penduduk. Kondisi tersebut membuat pemerintah terus mendorong kebijakan afirmatif untuk menarik tenaga medis ke daerah terpencil.

Secara internasional, kebijakan pemberian insentif tambahan bagi tenaga kesehatan di wilayah sulit juga diterapkan di berbagai negara. Australia, misalnya, sejak lama menjalankan skema Rural Health Incentive untuk dokter yang bersedia bertugas di pedalaman. Sementara Kanada memberikan tunjangan khusus bagi dokter di kawasan utara dan wilayah terpencil demi menjaga pemerataan layanan kesehatan nasional.

Di Indonesia, pola serupa mulai diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks itu, Buton Tengah dinilai menjadi salah satu contoh daerah yang berhasil menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam dukungan anggaran

daerah secara konkret. "Kepada seluruh kepala daerah, saya berharap kebijakan seperti ini bisa diteladani. Program pusat harus diperkuat oleh pemerintah daerah agar dokter merasa nyaman bekerja dan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik," ujar dr. Azhar Jaya.

Selain meninjau kesiapan operasional rumah sakit, rombongan Kementerian Kesehatan juga mengecek kesiapan sumber daya manusia, fasilitas medis, hingga dukungan pelayanan kesehatan dasar yang akan terintegrasi dengan RSUD tersebut.

Bupati Buton Tengah, Azhari, mengatakan pemerintah daerah menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Setelah kesehatan, pemerintah daerah kemudian memfokuskan pembangunan pada sektor pendidikan dan infrastruktur.

"Kesehatan adalah kebutuhan paling mendasar. Karena itu kami prioritaskan anggaran kesehatan terlebih dahulu. Kami sangat bersyukur pemerintah pusat menghadirkan RSUD PHTC di Buton Tengah," kata Azhari.

Menurut dia, kehadiran RSUD PHTC menjadi momentum penting dalam mempercepat peningkatan layanan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan. Ia mengakui, jika pembangunan rumah sakit modern tersebut hanya mengandalkan kemampuan APBD, prosesnya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang.

Azhari juga menilai berbagai program strategis pemerintah pusat dalam satu tahun terakhir telah memberikan dampak sig-

nifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi Buton Tengah meningkat menjadi 5,56 persen setelah sebelumnya hanya berada di kisaran 2,5 hingga 3,5 persen.

Peningkatan itu dipengaruhi oleh hadirnya sejumlah program nasional seperti RSUD PHTC, Sekolah Rakyat, pembangunan Gudang Bulog, Kampung Nelayan Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengembangan Kedai Koperasi Desa Merah Putih.

"Program-program ini tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Kami optimistis pertumbuhan ekonomi Buton Tengah akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan," ujar Azhari.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kini tengah memperkuat pengembangan kampus maritim yang disesuaikan dengan potensi sumber daya kelautan kawasan timur Indonesia. Pengembangan sektor pendidikan maritim tersebut diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berbasis kelautan.

Kunjungan Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI ke RSUD Buton Tengah menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan nasional. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan ketimpangan layanan medis sekaligus memperkuat pembangunan di kawasan kepulauan Indonesia. (*)

Dirjen Kemenkes Pastikan RSUD Buton Tengah Siap Beroperasi Penuh



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah pusat memperkuat pengawasan terhadap kesiapan layanan kesehatan daerah melalui kunjungan kerja Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Azhar Jaya, ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah, Jumat (8/5). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan rumah sakit itu siap beroperasi secara optimal menjelang peresmian resmi.

Kunjungan tersebut menandai komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan, khususnya di kawasan kepulauan dan daerah berkembang. Dalam agenda itu, Dirjen Kesehatan Lanjutan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas pelayanan, sistem operasional, hingga kesiapan sumber daya manusia di RSUD Buton Tengah.

Didampingi jajaran pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit, dr. Azhar Jaya meninjau langsung Instalasi Eksekutif, ruang pelayanan rawat jalan, alur administrasi pasien, hingga kesiapan fasilitas pendukung medis lainnya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan standar pelayanan rumah sakit telah sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan RI.

"Kami ingin memastikan seluruh instrumen pelayanan dapat berjalan efektif dan memenuhi standar mutu nasional sebelum rumah sakit ini dioperasikan secara penuh," ujar Azhar Jaya saat melakukan dialog bersama tenaga kesehatan di lokasi.

Selain pemeriksaan fisik bangunan, rombongan Kementerian Kesehatan juga menggelar diskusi teknis bersama tenaga medis dan jajaran manajemen RSUD. Forum tersebut membahas tantangan pelayanan kesehatan di

daerah, kebutuhan alat kesehatan, serta kesiapan tenaga medis dalam mendukung pelayanan masyarakat.

Upaya penguatan layanan kesehatan daerah tersebut sejalan dengan program transformasi sistem kesehatan nasional yang beberapa tahun terakhir terus didorong pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, pembangunan dan revitalisasi rumah sakit daerah menjadi salah satu fokus utama untuk mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

Secara historis, Indonesia mulai mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan pascapandemi Covid-19. Pemerintah kemudian memperluas pembangunan rumah sakit di berbagai daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus kesehatan, penguatan Universal Health Coverage (UHC), serta peningkatan kapasitas layanan rujukan nasional.

Langkah itu juga sejalan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization yang mendorong setiap negara memperkuat sistem layanan kesehatan primer dan rumah sakit regional guna meningkatkan ketahanan kesehatan nasional. WHO dalam sejumlah laporannya menyebut pemerataan fasilitas kesehatan menjadi faktor penting dalam menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bupati Buton Tengah, Azhari, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor kesehatan di wilayahnya. Menurut dia, dukungan Kementerian Kesehatan memiliki peran besar dalam percepatan pembangunan RSUD Buton Tengah.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat. Kehadiran Bapak Dirjen menjadi bukti nyata bahwa pembangunan layanan kesehatan di daerah mendapat

dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan," kata Azhari.

Ia menambahkan, percepatan pembangunan rumah sakit tersebut tidak terlepas dari dukungan pembiayaan pemerintah pusat dan implementasi program jaminan kesehatan nasional atau Universal Health Coverage yang terus diperkuat di daerah.

"Pembangunan yang berjalan cepat ini tentu tidak mungkin terlaksana tanpa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat. Kehadiran RSUD Buton Tengah diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan bagi warga di kawasan kepulauan dan daerah sekitar.

Direktur RSUD Buton Tengah, dr. Soraya Wildhani Jamil, Sp.PD, menyebut pihaknya terus melakukan pembenahan internal menjelang operasional penuh rumah sakit tersebut. Menurutnya, kesiapan tenaga kesehatan dan sistem pelayanan menjadi prioritas utama.

"Kami terus mempersiapkan seluruh aspek pelayanan agar masyarakat nantinya memperoleh layanan kesehatan yang aman, cepat, dan profesional," ujar Soraya.

Agenda kunjungan kerja kemudian ditutup dengan evaluasi lanjutan terkait kesiapan akhir operasional rumah sakit. Turut mendampingi kegiatan itu Kepala Dinas PUTR, Sekretaris Dinas Kesehatan Hasrun Hasan, S.K.M., M.Kes., serta jajaran pejabat Direktorat Jenderal Kesehatan RI.

Kehadiran lintas sektor dalam peninjauan tersebut menegaskan adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun layanan kesehatan yang merata, berkelanjutan, dan berstandar nasional bagi masyarakat Kabupaten Buton Tengah. (*)

Indonesia Kejar 960 Ribu Anak Zero-Dose Lewat Imunisasi Nasional



Peliput: Andina L

DEPOK, BP- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama sejumlah mitra pembangunan internasional menegaskan kembali komitmen penguatan program imunisasi nasional dalam momentum Puncak Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026. Kegiatan tersebut digelar di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Sabtu (2/5/2026), dengan fokus utama memperluas cakupan imunisasi dan menjangkau anak-anak yang belum pernah mendapatkan vaksin atau zero-dose.

Pemerintah mencatat capaian imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada 2025 telah mencapai 80,2 persen. Meski menunjukkan kemajuan, masih terdapat sekitar 960.000 anak yang belum mendapatkan imunisasi sama sekali. Kelompok ini menjadi perhatian serius dalam upaya percepatan perlindungan kesehatan anak di seluruh wilayah Indonesia.

Pt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menegaskan bahwa penguatan imunisasi rutin menjadi prioritas utama setelah pandemi COVID-19. Ia menyebutkan bahwa penurunan cakupan imunisasi sempat terjadi dan perlu segera dipulihkan melalui kerja sistematis lintas sektor.

“Imunisasi rutin

adalah kunci utama. Kita tidak boleh lengah karena risiko kejadian luar biasa seperti campak, difteri, atau pertusis bisa meningkat jika cakupan tidak optimal,” ujar dr. Andi Saguni dalam keterangannya.

Ia juga memastikan ketersediaan vaksin secara nasional dalam kondisi aman. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan stok vaksin hingga sembilan bulan ke depan untuk menghindari kekurangan distribusi di daerah.

“Kami pastikan ketersediaan vaksin aman, bahkan hingga sembilan bulan ke depan. Tidak boleh ada lagi alasan kekurangan vaksin,” tambahnya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas rantai dingin distribusi vaksin di seluruh wilayah.

Dari sisi mitra internasional, Perwakilan UNICEF Indonesia, Jean Lokenga, menegaskan bahwa imunisasi merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi. Ia menyoroti pentingnya menjangkau anak-anak yang belum pernah tersentuh layanan vaksinasi.

Menurutnya, lebih dari 100 juta dosis vaksin telah disalurkan melalui inisiatif The Big Catch-Up di 36 negara. Program tersebut menunjukkan bahwa hambatan akses dapat diatasi melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah dan mitra global.

“Namun kampanye

ini bukan pengganti sistem imunisasi rutin yang kuat. Sistem nasional tetap harus menjadi fondasi utama,” jelas Jean Lokenga dalam forum tersebut.

Sementara itu, Perwakilan WHO Indonesia, dr. Olivia, menekankan bahwa imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat paling efektif di dunia. Ia menyebut vaksin telah menyelamatkan lebih dari 150 juta jiwa secara global.

“Vaksin adalah investasi kesehatan yang sangat cost-effective dan harus terus diperkuat melalui sistem berbasis bukti ilmiah,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi Indonesia yang secara aktif memperingati Pekan Imunisasi Dunia sebagai bentuk komitmen nasional.

Di tingkat nasional, Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, dr. Indri, menegaskan bahwa momentum PID 2026 menjadi penggerak penting untuk mempercepat capaian imunisasi di Indonesia. Ia menyebut kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya nyata memperkuat kesadaran masyarakat.

“Melalui rangkaian kegiatan Pekan Imunisasi Dunia, kami ingin menguatkan kembali kesadaran masyarakat bahwa imunisasi sangat penting untuk melindungi generasi kita,” katanya.

Peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2026

menyusung tema global “For Every Generation, Vaccines Work” yang menegaskan bahwa vaksin efektif melindungi seluruh kelompok usia. Sementara tema nasional “Lengkapi Imunisasi Sepanjang Usia” menekankan pentingnya perlindungan kesehatan dari bayi hingga lanjut usia.

Rangkaian kegiatan puncak juga diisi dengan fun walk yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan serta layanan imunisasi langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bentuk pendekatan edukatif sekaligus pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan warga.

Salah satu peserta, Dila (33), yang membawa anaknya mengikuti imunisasi, mengapresiasi pelayanan yang diberikan. Ia menyebut proses berjalan tertib dan cepat tanpa antrean panjang.

“Ini imunisasi PCV ke-3, seru dan tidak perlu antre panjang. Saya berharap imunisasi ini bisa melindungi anak saya dari berbagai penyakit menular,” ujarnya.

Melalui kolaborasi pemerintah, organisasi internasional, dan partisipasi masyarakat, Kementerian Kesehatan RI optimistis target cakupan imunisasi nasional dapat terus meningkat. Upaya ini sekaligus menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Wamenkes Dorong Transformasi Layanan Kesehatan Syariah Nasional

TANGGERANG, BP- Pemerintah Indonesia terus memperkuat arah pengembangan layanan kesehatan berbasis nilai syariah yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual dan kemanusiaan dalam pelayanan kepada pasien. Penguatan ini menjadi bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang lebih inklusif dan holistik.

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menegaskan hal tersebut saat membuka 6th International Islamic Healthcare Conference and Expo di Tangerang, Rabu (6/5), yang digelar oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI).

Dalam forum internasional tersebut, Dante menyoroti bahwa kebutuhan pasien tidak hanya sebatas obat dan tindakan medis, tetapi juga mencakup ketenangan batin serta pelayanan yang menghormati nilai-nilai keyakinan.

“Ketika seseorang sedang sakit, ia membutuhkan rasa tenang, dihormati, dan keyakinan bahwa ia dirawat sesuai nilai yang diyakini. Ini bukan sekadar kenyamanan, tetapi kebutuhan spiritual yang fundamental,” ujar Dante.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dinilai memiliki peluang strategis untuk menjadi pusat layanan kesehatan halal global. Data demografis menunjukkan sekitar 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam, menjadikan kebutuhan layanan berbasis syariah semakin relevan dalam sistem kesehatan nasional.

Penguatan layanan kesehatan syariah juga dikaitkan dengan nilai dasar negara. Pemerintah menilai prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menjadi landasan penting dalam meng-

hadirkan pelayanan kesehatan yang menghormati keberagaman keyakinan masyarakat.

Dalam perkembangan historis, konsep rumah sakit berbasis nilai Islam telah berkembang sejak abad pertengahan melalui institusi Bimaristan di dunia Islam, yang dikenal sebagai pusat pelayanan kesehatan modern pada masanya. Model tersebut kemudian menginspirasi perkembangan rumah sakit modern di Eropa pada abad ke-19 yang menekankan aspek etika dan kemanusiaan.

Di Indonesia, perkembangan rumah sakit syariah mulai menguat dalam satu dekade terakhir. Saat ini tercatat 24 rumah sakit telah memperoleh sertifikasi syariah yang tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan.

“Capaian ini merupakan komitmen nyata untuk mengintegrasikan prinsip agama ke dalam pelayanan kesehatan,” kata Dante dalam sambutannya.

Selain rumah sakit, pemerintah juga perluasan ekosistem halal di sektor kesehatan. Hingga tahun 2026, sekitar 44 ribu produk farmasi di Indonesia telah mengantongi sertifikasi halal, mencakup obat-obatan dan produk medis lainnya.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Kementerian Kesehatan menggandeng sejumlah lembaga, di antaranya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta industri farmasi nasional dalam penguatan standar layanan.

Dante menegaskan bahwa prinsip halalan thayyiban harus menjadi standar utama dalam seluruh rantai layanan kesehatan. Prinsip ini tidak hanya menjamin kehalalan, tetapi juga kualitas dan keamanan produk kesehatan yang digunakan masyarakat.

“Rumah sakit syariah bukan hanya tentang label, tetapi tentang layanan yang holistik, humanis, dan berkeadilan,” tegas Dante.

Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), KH Cholil Nafis, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa sertifikasi syariah di sektor kesehatan bersifat universal dan dapat diterapkan di seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta.

Menurutnya, konsep layanan syariah mencakup aspek kebersihan, kehalalan produk, hingga sistem keuangan yang sesuai prinsip Islam, namun tetap dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.

“Seluruh layanan kesehatan harus memastikan kehalalan obat, alat kesehatan, kapsul, hingga bahan suntikan, serta memberikan rasa nyaman dan tenang kepada pasien,” ujar Cholil Nafis.

Ia menambahkan bahwa standar tersebut tidak hanya relevan di Indonesia, tetapi juga sejalan dengan tren global, di mana sejumlah negara seperti Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab telah lebih dahulu mengembangkan industri wisata kesehatan halal.

Konferensi bertema ‘From Certification to Collaboration’ itu dipandang menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk membangun ekosistem layanan kesehatan syariah yang terintegrasi di Indonesia.

Pemerintah berharap hasil forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi akademik, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat layanan kesehatan halal dunia yang berdaya saing global. (*)

PT FAREN GRAFIKA

Harian Pagi
Baubau Post

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasctio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Rinin
Pracetak: Aditya
Cetak: Jamaludin

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Eks Konsultan Kemendikbud Divonis 4 Tahun, Ini Pertimbangan Hakim



Eks konsultan era Nadiem, Ibam divonis 4 tahun penjara.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada mantan konsultan teknologi eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibrahim Arief alias Ibam, dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2020-2022. Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 15 tahun penjara.

Selain pidana badan, Ibam juga dijatuhi denda Rp500 juta subsider 120 hari kurungan. Putusan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/5), oleh ketua majelis hakim Purwanto S. Abdullah bersama empat hakim anggota lainnya.

Dalam amar putusan, majelis hakim menilai Ibam terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara pada proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Meski demikian, hakim menilai posisi Ibam berbeda dengan pejabat pembuat kebijakan strategis. Majelis menyebut terdakwa hanya berperan sebagai tenaga konsultan teknologi yang memberikan masukan teknis terkait pengadaan perangkat Chromebook.

“Terdakwa tidak

terbukti menerima aliran dana langsung dari pengadaan TIK kepada pribadinya,” ujar ketua majelis hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan pertimbangan putusan.

Pertimbangan lain yang meringankan hukuman ialah karena Ibam belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Hakim juga melihat kapasitas terdakwa tidak berada pada posisi penentu kebijakan utama dalam proyek pengadaan laptop tersebut.

Di sisi lain, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa tetap menciderai upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hakim juga menyoroti dampak sosial dari perkara tersebut karena proyek berlangsung saat pandemi Covid-19. Menurut majelis, dugaan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook berdampak terhadap proses pemetaan kualitas pendidikan nasional di tengah krisis kesehatan global.

“Perbuatan tersebut dilakukan pada sektor pendidikan di masa pandemi Covid-19 sehingga menimbulkan dampak ganda bagi negara dan dunia pendidikan,” kata Purwanto.

Perkara ini turut diwarnai perbedaan pendapat di internal majelis hakim. Dua hakim anggota, yakni Eryusman dan Andi Saputra, menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda terhadap putusan mayoritas hakim.

Kedua hakim tersebut berpandangan unsur pidana yang didakwakan jaksa belum terpenuhi secara utuh. Mereka menilai Ibam tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak-pihak internal kementerian sebelum proyek berjalan.

Selain itu, Ibam disebut tidak terbukti melakukan lobi atau pendekatan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan anggaran pengadaan Chromebook.

“Harga Chromebook yang disampaikan terdakwa hanya bersifat rekomendasi dan mengacu pada harga di marketplace,” ujar hakim anggota Andi Saputra dalam dissenting opinion yang dibacakan di persidangan.

Kasus pengadaan Chromebook sendiri menjadi salah satu perkara besar yang menyita perhatian publik karena berlangsung pada masa pandemi, ketika pemerintah tengah mendorong pembelajaran jarak jauh secara nasional. Saat itu, kebutuhan perangkat digital meningkat tajam seiring kebijakan sekolah daring di seluruh Indonesia.

Secara historis, proyek digitalisasi pendidikan bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara juga menghadapi persoalan serupa dalam pengadaan perangkat pendidikan digital selama pandemi Covid-19. Di Amerika Serikat dan India, misalnya, beberapa proyek pengadaan perangkat belajar daring sempat mendapat sorotan auditor negara akibat persoalan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.

Di Indonesia, program digitalisasi sekolah mulai dipercepat sejak 2020 sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Pemerintah ketika itu mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung akses teknologi pembelajaran bagi siswa dan guru di berbagai daerah.

Namun, sejumlah pengamat pendidikan sejak awal mengkritik efektivitas penggunaan Chromebook untuk wilayah dengan keterbatasan jaringan internet. Kritik tersebut kemudian berkembang menjadi perhatian publik setelah aparat penegak hukum mengungkap kasus korupsi dalam proyek pengadaan tersebut.

Jaksa sebelumnya menuntut Ibam dengan hukuman 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp16,92 miliar subsider tujuh tahun enam bulan penjara. Namun, majelis hakim memutuskan hukuman yang jauh lebih rendah dari tuntutan tersebut.

Hingga kini, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Baik jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa masih memiliki waktu tujuh hari kerja untuk menentukan sikap hukum, apakah melampaui putusan atau mengajukan upaya banding. (*)

Dosen PNUP Makassar Dijatuhi Sanksi Berat terkait Pelecehan Tiga Mahasiswi

Laporan: Hadi

MAKASSAR, BP- Politeknik Negeri Ujung Pandang mengambil langkah tegas terhadap seorang dosen Jurusan Akuntansi berinisial IS setelah dinyatakan terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap tiga mahasiswi di lingkungan kampus. Sanksi penonaktifan sementara hingga penurunan jabatan akademik dijatuhkan menyusul hasil investigasi internal yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) kampus.

Keputusan tersebut diumumkan pihak kampus melalui Humas PNUP Makassar, Rita, Selasa (12/5). Menurut Rita, langkah itu merupakan bentuk komitmen kampus dalam menciptakan ruang akademik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Satgas PPK melalui surat nomor 01/KS.RI/PPK/2026 tertanggal 16 April 2026, dosen berinisial IS dinyatakan terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual,” kata Rita dalam keterangan resminya.

Kasus tersebut bermula dari laporan para korban yang kemudian ditindaklanjuti melalui serangkaian pemeriksaan, pendampingan psikologis awal, pengumpulan alat bukti, hingga investigasi internal yang melibatkan Satgas PPKS PNUP.

Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan IS tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga mengganggu rasa aman dan martabat mahasiswi sebagai peserta didik di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagai tindak lanjut, Direktur PNUP menerbitkan Surat Keputusan Nomor 693/DST/PL10/KP.04.04/2026 pada 20 April 2026 yang menetapkan penonaktifan sementara IS dari seluruh aktivitas akademik.

Penonaktifan itu meliputi kegiatan mengajar, membimbing mahasiswa, menguji tugas akhir maupun skripsi, hingga seluruh aktivitas yang berhubungan langsung dengan mahasiswa di lingkungan kampus.

Tak berhenti pada penonaktifan, pihak kampus juga mengeluarkan Surat Teguran Tertulis Nomor 741/DST/PL10.KP.04.05/2026 tertanggal 23 April 2026 yang melarang IS memasuki kawasan kampus 1 dan kampus 2 PNUP.

“Sebagai sanksi disiplin lanjutan, PNUP menjatuhkan hukuman administratif berupa penurunan jabatan akademik terhadap pelaku,” ujar Rita.

Melalui Surat Keputusan Direktur Nomor 1211/P/2026 tertanggal 1 Mei 2026, jabatan akademik IS yang sebelumnya menyanggah posisi Lektor diturunkan menjadi Asisten Ahli selama 12 bulan.

Selain memberikan sanksi kepada pelaku, kampus juga memastikan ketiga korban memperoleh layanan pendampingan psikologis melalui program trauma healing guna membantu proses pemulihan pascakejadian.

“Kampus berkomitmen memastikan penanganan kasus berjalan secara komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban,” tutur Rita.

PNUP juga melakukan koordinasi internal bersama pimpinan politeknik, Jurusan Akuntansi, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk memperkuat pengawasan serta sistem pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Kasus yang terjadi di PNUP menambuh daftar panjang persoalan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, isu tersebut menjadi perhatian nasional setelah muncul berbagai laporan serupa dari sejumlah kampus be-

sar di Indonesia.

Pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan khusus melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang diperbarui menjadi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Regulasi itu mewajibkan kampus membentuk Satgas PPKS sebagai instrumen penanganan dan perlindungan korban.

Secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pernah mencatat bahwa lingkungan pendidikan masih menjadi salah satu lokasi rawan terjadinya kekerasan seksual, terutama relasi kuasa antara pengajar dan mahasiswa.

Fenomena serupa juga menjadi perhatian dunia internasional. Di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, kampus-kampus besar dalam satu dekade terakhir memperketat kebijakan perlindungan mahasiswa setelah meningkatnya laporan pelecehan seksual yang melibatkan tenaga pengajar maupun civitas akademika.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) bahkan menempatkan isu kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan sebagai salah satu perhatian global karena berdampak pada kesehatan mental, kualitas belajar, serta keberlangsungan pendidikan korban.

Kasus di PNUP Makassar menjadi pengingat bahwa perguruan tinggi tidak hanya dituntut menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu menjamin keamanan serta perlindungan hak mahasiswa di lingkungan akademik. (*)

Suasana Haru Warnai Pelepasan 135 Calon Jemaah Haji Asal Kota Baubau, Wawali Baubau Minta Jemaah Utamakan Kesehatan dan jaga Nama Baik Daerah Selama di Tana Suci



Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau resmi melepas keberangkatan 135 calon jemaah haji musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Senin (11/05/2026). Pelepasan dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, disaksikan keluarga jemaah, unsur Forkopimda, kepala OPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Momentum pelepasan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menandai dimulainya perjalanan spiritual ratusan warga Baubau menuju Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Suasana haru tampak menyelimuti aula ketika para jemaah berpamitan dengan keluarga sebelum bertolak menuju embarkasi.

Dalam sambutannya, Wa Ode Hamsinah Bolu mengingatkan para calon jemaah agar menjaga niat dan mempersiapkan diri secara fisik maupun mental selama menjalankan ibadah haji. Menurut dia, perjalanan haji bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan panggilan suci yang sangat dinantikan umat Islam di seluruh dunia.

"Haji merupakan ibadah yang memiliki makna spiritual sangat mendalam. Melalui ibadah haji, seorang muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membersihkan diri dari dosa dan kesalahan," ujar Wa Ode Hamsinah Bolu di hadapan para calon jemaah.

Ia meminta seluruh jemaah memanfaatkan kesempatan berhaji dengan penuh keikhlasan dan kekhayusan. Para jemaah juga diminta untuk sementara meninggalkan berbagai urusan duniawi agar dapat fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Selain kesiapan spiritual, Wakil Wali Kota Baubau menekankan pentingnya menjaga kondisi kesehatan. Ia mengingatkan bahwa ibadah haji memerlukan stamina yang baik mengingat padatnya aktivitas dan cuaca ekstrem di Arab Saudi yang kerap mencapai lebih dari 40 derajat Celsius pada musim panas.

"Jangan memaksakan diri melakukan ibadah sunnah apabila kondisi fisik tidak memungkinkan. Utamakan rukun dan wajib haji," katanya.

Ia juga mengimbau para jemaah untuk menjaga pola makan, rutin mengonsumsi obat-obatan pribadi, memperbanyak istirahat, serta melakukan

olahraga ringan agar kondisi tubuh tetap prima selama menjalankan ibadah.

Di sisi lain, Wa Ode Hamsinah Bolu menegaskan bahwa para jemaah haji merupakan representasi daerah dan bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Karena itu, seluruh jemaah diminta menjaga sikap, kedisiplinan, serta menjunjung tinggi tata krama selama berada di Tanah Suci.

"Para jemaah adalah duta bangsa dan duta daerah. Tunjukkan sikap sopan santun, disiplin, serta saling membantu, terutama kepada jemaah lanjut usia," ujarnya.

Menurut data Kementerian Agama RI, Indonesia hingga kini masih menjadi negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kuota haji Indonesia berkisar lebih dari 220 ribu jemaah setiap musim haji. Sementara Arab Saudi terus melakukan modernisasi layanan haji, termasuk pengembangan kawasan Masjidil Haram dan sistem digital pelayanan jemaah internasional.

Secara historis, pelaksanaan ibadah haji telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu dan menjadi salah satu pertemuan umat Islam terbesar di dunia. Dalam catatan sejarah Indonesia, ke-

berangkatan jemaah haji Nusantara sudah dilakukan sejak abad ke-16 melalui jalur pelayaran laut yang memakan waktu berbulan-bulan sebelum akhirnya berkembang menggunakan transportasi udara modern seperti saat ini.

Bagi masyarakat Indonesia, ibadah haji juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Gelar haji sering kali dipandang sebagai simbol keberhasilan spiritual dan keteladanan moral di lingkungan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah rutin memberikan bekal kepada calon jemaah agar mampu menjalankan ibadah dengan baik dan kembali menjadi teladan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Baubau turut menitipkan doa kepada seluruh jemaah agar mendoakan Kota Baubau tetap aman, damai, dan sejahtera. Ia berharap seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta memperoleh predikat haji mabrur dan mabrurah.

Pelepasan jemaah haji tersebut kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama setempat. Sejumlah keluarga tampak menitipkan air mata saat para calon jemaah bersiap meninggalkan lokasi acara menuju tahapan keberangkatan berikutnya. (*)

berangkatkan jemaah haji Nusantara sudah dilakukan sejak abad ke-16 melalui jalur pelayaran laut yang memakan waktu berbulan-bulan sebelum akhirnya berkembang menggunakan transportasi udara modern seperti saat ini.

Bagi masyarakat Indonesia, ibadah haji juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Gelar haji sering kali dipandang sebagai simbol keberhasilan spiritual dan keteladanan moral di lingkungan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah rutin memberikan bekal kepada calon jemaah agar mampu menjalankan ibadah dengan baik dan kembali menjadi teladan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Baubau turut menitipkan doa kepada seluruh jemaah agar mendoakan Kota Baubau tetap aman, damai, dan sejahtera. Ia berharap seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta memperoleh predikat haji mabrur dan mabrurah.

Pelepasan jemaah haji tersebut kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama setempat. Sejumlah keluarga tampak menitipkan air mata saat para calon jemaah bersiap meninggalkan lokasi acara menuju tahapan keberangkatan berikutnya. (*)

Mohamad Tasdik Buka POPDA Baubau 2026, Tekankan Fair Play Atlet



Laporan: Andina

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau resmi menggelar Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Kota Baubau Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pembinaan atlet usia pelajar sekaligus penjangkaran bibit muda berprestasi untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi hingga nasional.

Pembukaan ajang olahraga pelajar tersebut dilakukan oleh Staf Ahli Wali Kota Baubau Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Mohamad Tasdik, yang hadir mewakili Wali Kota Baubau. Kegiatan berlangsung meriah dengan diikuti pelajar dari berbagai sekolah di Kota Baubau.

Dalam sambutannya, Mohamad Tasdik menegaskan bahwa POPDA bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembinaan olahraga pelajar di daerah.

"POPDA 2026 ini menjadi ajang evaluasi untuk mengukur capaian prestasi atlet pelajar kita. Pembinaan olahraga harus dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kota, provinsi hingga nasional," ujar Mohamad Tasdik.

Menurut dia, penyelenggaraan kompetisi olahraga di tingkat pelajar memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda, terutama dalam menanamkan disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sportivitas.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Baubau tersebut juga diharapkan mampu

melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Kota Baubau pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Mohamad Tasdik mengatakan, Pemerintah Kota Baubau memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan POPDA, mulai dari panitia penyelenggara, guru pendamping, pelatih, wasit hingga juri pertandingan.

"Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini. Semoga dari ajang ini lahir atlet-atlet muda yang mampu membawa nama Baubau lebih dikenal di tingkat nasional," katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, kemenangan dan kekalahan merupakan hal lumrah dalam kompetisi olahraga.

"Menang atau kalah adalah hal biasa. Yang paling penting adalah sportivitas dan profesionalisme harus tetap dijaga," tegasnya.

Selain peserta, perangkat pertandingan juga diminta bekerja secara profesional dan adil dalam mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku demi menjaga kualitas kompetisi.

"Wasit dan juri harus bertindak tegas, objektif, dan adil agar pertandingan berjalan berkualitas dan dipercaya semua pihak," tambah Mohamad Tasdik.

Secara historis, POPDA merupakan bagian dari sistem pembinaan olahraga pelajar yang telah lama diterapkan di Indonesia. Program kompetisi pelajar antardaerah

mulai berkembang sejak era 1980-an sebagai bagian dari pembinaan atlet usia dini sebelum memasuki ajang yang lebih besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) maupun kompetisi internasional.

Di tingkat nasional, banyak atlet Indonesia lahir dari kompetisi olahraga pelajar dan pembinaan usia muda. Sejumlah nama besar seperti legenda bulu tangkis Susi Susanti dan Alan Budikusuma diketahui meniti karier dari pembinaan olahraga sejak usia sekolah sebelum akhirnya mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia.

Sementara secara internasional, sistem kompetisi olahraga pelajar juga menjadi fondasi penting dalam pembinaan atlet muda di berbagai negara. Ajang seperti Youth Olympic Games yang digagas International Olympic Committee menjadi contoh bagaimana pembinaan usia muda dipersiapkan untuk mencetak atlet profesional dan berprestasi global.

Pemerintah Kota Baubau berharap POPDA 2026 tidak hanya menjadi ajang perebutan medali, tetapi juga membuka ruang pembentukan karakter generasi muda yang sehat, kompetitif, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah melalui prestasi olahraga.

Melalui pelaksanaan POPDA tahun ini, sinergi antara pemerintah, sekolah, pelatih, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mendukung p e n g e m b a n g a n olahraga pelajar di Kota Baubau secara berkelanjutan. (*)